

PENDIDIKAN DEMOKRASI DI ERA GLOBALISASI: TANTANGAN DAN PELUANG

Zam Zam Lukmanul Jamil¹, Salahudin Syaf², Mahmud³, Mohamad Erihadiana⁴

¹Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI), STAI Al Badar Cipulus Purwakarta, Kp. Pesantren, Nagrog, Wanayasa, Purwakarta, Jawa Barat

²Program Studi Ilmu Pendidikan Islam (IPI) S3 Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati-MA Husainiyah Cicalengka, Jl. Pamoyanan 33, Panenjoan, Cicalengka, Bandung, Jawa Barat

^{3,4}Program Studi Ilmu Pendidikan Islam (IPI) S3 Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Jl. Soekarno-Hatta No.750, Cimenerang, Gedebage, Bandung, Jawa Barat

¹e-mail: zamzam.eljamil@gmail.com

Submitted
2024-07-01

Accepted
2024-11-05

Published
2024-12-31

OPEN ACCESS



Abstrak

Pendidikan demokrasi memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, partisipatif, dan toleran, terutama di era globalisasi yang penuh tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi isu-isu krusial pendidikan demokrasi, termasuk ketidaksetaraan akses, dampak transformasi digital, polarisasi politik, serta integrasi nilai-nilai demokrasi dalam kurikulum. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menganalisis literatur terkait pendidikan demokrasi dalam konteks perubahan global. Hasilnya menunjukkan bahwa teknologi digital menawarkan peluang besar untuk memperluas akses pendidikan demokrasi, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa disinformasi dan polarisasi opini. Selain itu, kesenjangan pendidikan akibat faktor sosial-ekonomi memperkuat urgensi pengembangan kurikulum yang inklusif. Penelitian ini merekomendasikan strategi peningkatan literasi digital, penguatan kolaborasi antara pendidikan formal dan non-formal, serta optimalisasi peran lembaga pendidikan dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan pendidikan demokrasi guna mendukung terciptanya masyarakat global yang adil dan demokratis.

Kata Kunci: Pendidikan demokrasi, globalisasi, transformasi digital.

Abstract

Democracy education plays an important role in creating an inclusive, participatory, and tolerant society, especially in the challenging era of globalization. This research explores crucial issues of democratic education, including inequality of access, the impact of digital transformation, political polarisation, and the integration of democratic values in the curriculum. Using a qualitative, desk-based approach, this research analyses the literature on democratic education in the context of global change. The results show that digital technology offers great opportunities to expand access to democracy education, but also presents challenges of disinformation and polarisation of opinions. In addition, educational disparities due to socioeconomic factors reinforce the urgency of inclusive curriculum development. This research recommends strategies to improve digital literacy, strengthen collaboration between formal and non-formal education, and optimize the role of educational institutions in promoting democratic values. The implications of this research are expected to contribute to strengthening democratic education to support the creation of a just and democratic global society.



Keywords: *Democratic education, globalization, digital transformation.*

PENDAHULUAN

Pendidikan demokrasi menjadi dasar penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan partisipatif di era globalisasi saat ini. Dalam konteks perubahan dinamis politik yang terus berlangsung dan revolusi informasi yang mengubah cara interaksi kita, sangat penting bagi negara-negara di seluruh dunia untuk memperkuat pendidikan demokrasi agar dapat menghadapi tantangan-tantangan yang muncul. Penelitian ini akan mengkaji isu-isu penting terkait pendidikan demokrasi di era globalisasi, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang memengaruhi pelaksanaan pendekatan pendidikan demokratis.

Perkembangan teknologi digital dan media sosial menjadi fenomena signifikan dalam memengaruhi pendidikan demokrasi. Media sosial tidak hanya memberikan akses luas terhadap informasi tetapi juga menciptakan tantangan berupa disinformasi dan polarisasi opini. Sebagai contoh, penelitian Pew Research Center (2021) menunjukkan bahwa lebih dari 64% masyarakat global menerima informasi politik melalui media sosial. Namun, platform ini juga memfasilitasi penyebaran ujaran kebencian dan informasi palsu yang dapat menghambat pembentukan masyarakat demokratis yang sehat (Auxier & Anderson, 2021).

Selain itu, pandemi COVID-19 telah memperlihatkan ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan, terutama bagi kelompok marginal. Sebuah laporan dari UNICEF (2020) menyatakan bahwa lebih dari 1,6 miliar pelajar di seluruh dunia mengalami gangguan dalam pendidikan selama pandemi. Dampak ini lebih besar dirasakan oleh negara berkembang dan memperburuk kesenjangan pendidikan yang sudah ada sebelumnya, menjadi hambatan besar bagi pelaksanaan pendidikan demokrasi.

Beberapa permasalahan utama yang muncul dalam konteks pendidikan demokrasi meliputi ketidaksetaraan akses pendidikan, minimnya integrasi nilai-nilai demokrasi dalam kurikulum, dan tantangan dalam membentuk warga negara yang kritis. Ketimpangan dalam memperoleh pendidikan formal, terutama di daerah terpencil, memperlemah kapasitas individu untuk berpartisipasi aktif dalam sistem

demokrasi. Banyak institusi pendidikan juga belum sepenuhnya mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi ke dalam proses pembelajaran. Di sisi lain, meskipun teknologi menyediakan akses terhadap berbagai informasi, kurangnya literasi digital menyebabkan sulitnya membedakan informasi yang valid dan tidak valid.

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas pentingnya pendidikan demokrasi dalam membentuk masyarakat yang inklusif dan toleran. Sebagai contoh, sebuah studi di Indonesia, penelitian oleh Damayanti, Suryadi, and Tanszhil (2024) menunjukkan bahwa pendidikan berbasis nilai Pancasila dapat menjadi fondasi yang kuat untuk pendidikan demokrasi di sekolah-sekolah. Namun, penelitian terkait pengaruh era digital terhadap pendidikan demokrasi masih terbatas. Sebagian besar studi yang ada lebih fokus pada aspek pendidikan umum tanpa mengkaji secara mendalam tantangan yang muncul akibat transformasi digital. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi untuk memahami bagaimana pendidikan demokrasi dapat beradaptasi di tengah perubahan zaman.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: bagaimana pengaruh ketidaksetaraan akses terhadap keberhasilan pendidikan demokrasi? Bagaimana dampak transformasi digital terhadap pelaksanaan pendidikan demokrasi? Strategi apa yang dapat diimplementasikan untuk mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi ke dalam kurikulum di era globalisasi? Dan bagaimana cara meningkatkan literasi digital guna mendukung pembentukan warga negara yang kritis dan bertanggung jawab?

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan pendidikan demokrasi di era globalisasi dengan menjawab berbagai pertanyaan yang relevan. Melalui pemahaman yang mendalam dan analisis yang terarah, penelitian ini bertujuan untuk menggali solusi dan strategi yang dapat memperkuat nilai-nilai demokrasi dalam dunia pendidikan, sehingga mampu menjawab tantangan global secara efektif dan berkelanjutan.



METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Sumber data penelitian ini diperoleh dari buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pendidikan demokrasi serta isu-isu krusial pendidikan demokrasi. Pendekatan kualitatif dipilih mengingat tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran pendidikan demokrasi di era globalisasi: tantangan dan peluang.

Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dokumentasi dengan mengumpulkan data dari literatur berupa buku, artikel jurnal, dan dokumen terkait lainnya. Alat pengumpulan data berupa daftar panduan literatur yang relevan dengan topik penelitian (Creswell & Creswell, 2017).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yang dilakukan dengan membaca, menginterpretasikan, dan mengorganisasikan data yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka. Data dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola, serta hubungan antar konsep yang relevan dengan pendidikan demokrasi di era globalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi adalah cara hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua bangsa. Dengan kata lain, kekuasaan ada di tangan rakyat, dan sementara mekanisme demokrasi dalam politik tidak persis sama dengan yang ada di lembaga pendidikan, substansi demokrasi adalah: Semangat pendidikan baik dalam perencanaan, manajemen, dan evaluasi (Wulandari et al., 2023).

Demokrasi dalam dunia pendidikan berarti menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, menyuarakan pendapat, dan mengembangkan potensinya (A et al., 2023). Hal ini tercermin dalam penerapan pembelajaran kolaboratif, pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak, serta pemberian kebebasan berpikir yang bertanggung jawab, yang pada gilirannya menguatkan nilai-nilai keadilan, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman.

Isu-isu Krusial Pendidikan Demokrasi

Pendidikan demokrasi menghadapi tantangan besar di era globalisasi, termasuk ketimpangan akses, polarisasi politik, dampak negatif media sosial, ketidaksetaraan di era digital, serta ketidakmampuan sistem pendidikan dalam menjawab tantangan kontemporer. Semua isu ini berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan keberlanjutan sistem demokratis. Oleh karena itu, penanganan masalah ini sangat penting untuk memperkuat pendidikan demokrasi sekaligus mendukung keberhasilan demokrasi di tengah dinamika global.

Salah satu tantangan utama adalah ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan demokrasi. Di banyak negara, wilayah terpinggirkan atau daerah konflik sering kali memiliki akses terbatas terhadap pendidikan ini (Lathifah et al., 2024). Martha C. Nussbaum menyatakan bahwa pendidikan demokrasi harus menjadi hak dasar setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis mereka (Burman & Myrebøe, 2019). Ketimpangan akses ini berpotensi menciptakan kesenjangan partisipasi demokratis, sehingga perlu ada kebijakan yang memastikan inklusivitas.

Polarisasi politik juga menjadi hambatan besar dalam pendidikan demokrasi. Ketegangan politik yang meningkat dapat menghalangi tercapainya konsensus dalam pembentukan kurikulum pendidikan demokrasi yang inklusif (Erlande et al., 2024). Amartya Sen menekankan pentingnya pendidikan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih luas tentang konsep keadilan, yang menjadi landasan utama sistem demokrasi (Kjosavik, 2021). Dengan demikian, pendidikan demokrasi harus mampu menjembatani perbedaan ideologi dan memperkuat kohesi sosial.

Teknologi digital memiliki peran ganda dalam pendidikan demokrasi. Di satu sisi, teknologi dapat memperluas akses informasi, tetapi di sisi lain, penyebaran misinformasi dan disinformasi di media sosial dapat merusak integritas pendidikan demokrasi (Allifa et al., 2024). Lawrence Lessig menyarankan perlunya regulasi yang lebih ketat terhadap platform digital untuk mencegah manipulasi informasi yang dapat membahayakan demokrasi (Oral, 2024). Dengan pengelolaan yang bijak, teknologi dapat menjadi alat yang mendukung pembelajaran demokrasi.



Lembaga pendidikan formal sering kali kurang memberikan perhatian pada aspek kritis dan partisipatif dalam pendidikan demokrasi. Kurikulum yang terlalu terfokus pada hafalan cenderung mengabaikan pengembangan kesadaran kritis peserta didik (Asril et al., 2023). Paulo Freire mengingatkan pentingnya pendekatan pendidikan yang berpusat pada peserta didik, yang mendorong dialog dan membangun kesadaran kritis sebagai bagian dari proses demokratisasi (Tshishonga, 2023). Reformasi kurikulum perlu dilakukan untuk memastikan pendidikan demokrasi lebih relevan dan kontekstual.

Selain itu, keterlibatan internasional dalam pendidikan demokrasi juga menjadi isu sensitif. Campur tangan asing yang berlebihan dalam sistem pendidikan nasional dapat memunculkan kontroversi dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat (Sukasni & Efendy, 2017). Noam Chomsky mengingatkan akan bahaya hegemoni informasi dan kepentingan geopolitik yang dapat memengaruhi pendidikan demokrasi, terutama di negara berkembang (Allott et al., 2019). Oleh karena itu, perlu kebijakan yang menjaga kedaulatan sistem pendidikan nasional tanpa menutup diri dari kerja sama global.

Secara keseluruhan, isu-isu dalam pendidikan demokrasi, mulai dari ketidaksetaraan akses hingga polarisasi politik, pengaruh teknologi, kelemahan kurikulum formal, dan keterlibatan internasional, mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam membangun sistem pendidikan demokrasi yang kuat. Semua isu ini saling terkait dan berdampak pada partisipasi masyarakat, pembentukan pandangan politik, serta keberlanjutan demokrasi. Penanganan yang terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan tersebut dan memperkuat demokrasi di tengah perubahan global.

Peran Teknologi dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan Demokrasi

Teknologi berperan penting dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan demokrasi di era modern. Kemajuan internet, media sosial, dan platform pembelajaran daring mempermudah akses terhadap informasi dan pelatihan tentang demokrasi (Khusniya & Syafi'i, 2024). Selain itu, teknologi mendukung partisipasi aktif melalui forum diskusi, platform kolaboratif, dan aplikasi polling, yang mendorong inklusivitas dan responsivitas (Afzalan & Muller, 2018). Dengan

demikian, teknologi tidak hanya memperluas jangkauan pendidikan demokrasi tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses demokratis.

Sejumlah tokoh dan ilmuwan telah mengemukakan pandangan mereka mengenai peran teknologi dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan demokrasi. Lawrence Lessig menyoroti bahwa desain teknologi, seperti media sosial dan mesin pencari, memiliki pengaruh signifikan terhadap cara masyarakat menerima informasi dan berpartisipasi dalam demokrasi (Oral, 2024). Ia juga mengingatkan tentang bahaya manipulasi informasi di era digital, sehingga regulasi diperlukan untuk memastikan teknologi mendukung nilai-nilai demokrasi, memperluas akses pendidikan demokrasi, dan mengatasi tantangan yang ada. Clay Shirky menambahkan bahwa teknologi digital, melalui media sosial dan platform kolaboratif, memungkinkan partisipasi massal dalam proses politik dan pembelajaran kolaboratif tentang prinsip-prinsip demokrasi, sekaligus membuka akses lebih luas terhadap informasi (Schirch, 2021).

Cathy N. Davidson menggarisbawahi bahwa teknologi digital dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan responsif, di mana individu dapat mengakses informasi dengan mudah dan berkolaborasi secara efektif. Hal ini memperkuat keterampilan partisipatif dalam masyarakat demokratis (Wulandari et al., 2023). Howard Rheingold (2014), dalam bukunya *Net Smart: How to Thrive Online*, menggali pentingnya literasi digital yang kritis dalam pendidikan demokrasi. Ia menekankan perlunya mengajarkan individu cara memilah informasi, mengevaluasi sumber, dan berpartisipasi dalam diskusi *online* secara konstruktif sebagai bagian dari pengembangan keterampilan demokrasi.

Zeynep Tufekci (2017) menyoroti peran teknologi digital, seperti media sosial, dalam memengaruhi dinamika gerakan sosial dan politik di era digital. Ia menjelaskan bagaimana teknologi memungkinkan akses terhadap informasi, koordinasi aksi kolektif, dan pembentukan opini publik yang kuat. Teknologi, menurutnya, dapat mendukung nilai-nilai demokrasi dengan memberdayakan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam isu-isu sosial dan politik, meskipun tantangan dalam penggunaannya tetap memerlukan perhatian serius.



Secara keseluruhan, pandangan para tokoh ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya memperluas akses pendidikan demokrasi tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, mereka juga mengingatkan akan tantangan seperti manipulasi informasi, yang memerlukan regulasi dan pendekatan kritis untuk memastikan teknologi benar-benar mendukung penguatan demokrasi.

Peran Lembaga Pendidikan Formal dan Non-Formal dalam Mempromosikan Nilai-nilai Demokratis

Lembaga pendidikan formal dan non-formal memiliki peran penting dan saling melengkapi dalam mempromosikan nilai-nilai demokratis. Pendidikan formal, seperti sekolah dan universitas, menyediakan pembelajaran terstruktur tentang prinsip demokrasi, membentuk keterampilan partisipatif, dan mendorong kewarganegaraan aktif melalui kurikulum, ekstrakurikuler, serta simulasi seperti pemilu. Di sisi lain, pendidikan non-formal yang diinisiasi oleh LSM dan organisasi masyarakat menawarkan pendekatan fleksibel dan responsif terhadap isu sosial, seperti pelatihan hak asasi manusia dan workshop kepemimpinan, yang memberdayakan masyarakat, termasuk kelompok marjinal.

Kolaborasi antara pendidikan formal dan non-formal mampu memperkuat nilai-nilai demokrasi melalui program-program sinergis, seperti seminar bersama dan pengabdian masyarakat. Inisiatif ini tidak hanya memperluas wawasan siswa tetapi juga meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, sehingga pendidikan menjadi motor penggerak perubahan sosial menuju masyarakat demokratis dan inklusif.

Pemikiran tokoh seperti Paulo Freire, John Dewey, Bell Hooks, dan Martha Nussbaum menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai ruang pembebasan dan pembentukan kesadaran kritis (Burman & Myrebøe, 2019). Freire menekankan bahwa pendidikan harus mendorong individu untuk mempertanyakan ketidakadilan dan melawan struktur penindasan (Tshishonga, 2023). Dewey menganggap pendidikan sebagai laboratorium demokrasi, di mana siswa belajar melalui refleksi, eksperimen, dan partisipasi aktif (Herman & Pinard, 2015).

Bell Hooks dan Martha Nussbaum menekankan nilai inklusivitas, empati, dan tanggung jawab sosial dalam pendidikan (Kjosavik, 2021). Dengan mempromosikan dialog, menghargai berbagai perspektif, dan membentuk warga

yang empatik serta kritis, pendidikan formal dan non-formal bersama-sama dapat menciptakan generasi yang mampu berpikir kritis, bertindak bijaksana, dan berkontribusi positif bagi masyarakat demokratis.

Peluang yang Muncul dalam Konteks Globalisasi untuk Memperkuat Pendidikan Demokrasi

Nussbaum menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk individu yang memiliki empati dan tanggung jawab. Dalam konteks globalisasi, pembelajaran lintas-batas menjadi sarana untuk memperkaya pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi dari berbagai budaya. Melalui interaksi lintas-budaya, individu dapat memperluas pandangan mereka dan memperkuat keterampilan partisipatif yang diperlukan untuk menjadi warga global yang aktif dan bertanggung jawab (Kjosavik, 2021).

Teknologi juga memainkan peran penting dalam mendukung pendidikan demokrasi. Lessig menyoroti bahwa teknologi dapat membentuk lingkungan informasi dan menegaskan perlunya regulasi yang tepat untuk memastikan teknologi tersebut mendukung nilai-nilai demokrasi. Dengan memanfaatkan teknologi, pendidikan demokrasi dapat menjadi lebih mudah diakses secara global. Teknologi memungkinkan individu dari berbagai latar belakang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan partisipatif yang relevan, meskipun mereka berada di lokasi geografis yang berbeda (Oral, 2024).

Jaringan komunikasi global telah mengubah dinamika sosial, politik, dan ekonomi di era digital. Castells menyoroti bagaimana koneksi dan jaringan internasional dapat menjadi katalisator dalam pendidikan demokrasi. Pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara lembaga pendidikan di seluruh dunia tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga memperkuat upaya untuk meningkatkan partisipasi demokratis di berbagai wilayah (Ernada et al., 2024).

Peran masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah (LSM) juga tidak dapat diabaikan dalam pendidikan demokrasi. Chomsky menekankan bahwa masyarakat sipil memiliki tanggung jawab penting dalam mengawasi kekuasaan politik dan media. Dalam konteks globalisasi, LSM dapat memobilisasi masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam proses demokrasi (Hakim, 2023). Kolaborasi antar-LSM



di berbagai negara dapat memperkuat upaya global dalam mendukung pendidikan demokrasi dan membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya nilai-nilai demokrasi.

Dengan pembelajaran lintas-batas, teknologi, jaringan internasional, dan keterlibatan masyarakat sipil, pendidikan demokrasi memiliki potensi besar untuk berkembang dan menjangkau lebih banyak individu. Strategi ini tidak hanya memperkuat nilai-nilai demokrasi, tetapi juga membantu menciptakan masyarakat global yang lebih inklusif, partisipatif, dan bertanggung jawab.

Tantangan yang terkait dengan pendidikan demokrasi di era globalisasi

Pendidikan adalah bagian integral dari kebebasan individu, namun kesenjangan akses terhadap pendidikan tetap menjadi tantangan utama, terutama di negara-negara berkembang. Ketimpangan ini menghambat pengembangan keterampilan partisipatif dan kesadaran politik yang diperlukan untuk membangun masyarakat demokratis (Nasir et al., 2023). Dalam konteks ini, memastikan kesetaraan akses menjadi langkah penting untuk memperkuat fondasi demokrasi di era globalisasi.

Meningkatnya polarisasi politik dan ketegangan sosial di berbagai negara juga memberikan tantangan signifikan bagi pendidikan demokrasi. Ketegangan ini sering kali mengganggu proses pencapaian konsensus dan menghambat pengembangan kesadaran kolektif tentang nilai-nilai demokrasi (McCoy et al., 2018). Pendidikan demokrasi yang inklusif diperlukan untuk menjembatani perbedaan pandangan dan membangun harmoni sosial.

Di sisi lain, pengaruh media sosial dalam pendidikan demokrasi menjadi pedang bermata dua. Media sosial dapat memperkuat filter bubble dan mendorong polarisasi opini, sehingga menghalangi akses masyarakat terhadap sudut pandang yang beragam. Lebih parah lagi, disinformasi yang tersebar melalui platform digital dapat merusak upaya pendidikan demokrasi dengan menyebarkan informasi yang salah (Hazzan, 2022). Oleh karena itu, literasi digital harus menjadi bagian penting dalam kurikulum pendidikan demokrasi.

Ketidaksetaraan akses terhadap teknologi dan informasi di era digital juga memperparah tantangan pendidikan demokrasi. Castells menggarisbawahi bahwa

individu dengan akses terbatas terhadap teknologi cenderung tertinggal dalam pengembangan keterampilan partisipatif. Ketimpangan digital ini memperkuat kesenjangan dalam pendidikan demokrasi, sehingga diperlukan kebijakan yang mendukung pemerataan akses teknologi (Swastiwi, 2024).

Selain itu, sistem pendidikan sering kali dinilai belum mampu mengatasi tantangan kontemporer seperti globalisasi, teknologi, dan polarisasi politik. Pendidikan humaniora, menurut Nussbaum, memiliki peran penting dalam membangun warga yang kritis, empatik, dan aktif berpartisipasi dalam demokrasi (Burman & Myrebøe, 2019). Namun, kurangnya adaptasi sistem pendidikan terhadap perubahan zaman menghambat efektivitas pendidikan demokratis.

Pemahaman mendalam terhadap berbagai tantangan ini sangat penting untuk merancang pendidikan demokrasi yang tangguh. Dengan menanggapi isu-isu globalisasi, teknologi, dan polarisasi secara holistik, pendidikan demokrasi dapat mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif, berpartisipasi, dan demokratis.

Pendidikan Demokrasi di Indonesia dalam Era Globalisasi

Pendidikan demokrasi disampaikan melalui berbagai jalur, baik formal maupun non-formal. Dalam pendidikan formal, materi demokrasi diajarkan melalui mata pelajaran seperti Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah, yang membahas hak dan kewajiban warga negara. Di sisi lain, pendidikan non-formal diberikan melalui seminar, pelatihan, dan lokakarya yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan tinggi. Kegiatan ini bertujuan memperdalam pemahaman serta meningkatkan keterampilan berpartisipasi aktif dalam demokrasi.

Media massa dan media sosial memegang peranan penting dalam membentuk opini publik dan mendorong partisipasi politik. Literasi media dan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi menjadi elemen krusial dalam pendidikan demokrasi (Jamil, 2020). Selain itu, diskusi publik yang sehat melalui platform digital dapat mendukung terciptanya budaya dialog yang konstruktif dalam kehidupan berdemokrasi.

Pendidikan demokrasi juga berfokus pada pengembangan keterampilan yang relevan untuk menjadi warga negara yang aktif. Keterampilan seperti berpikir kritis,



komunikasi yang efektif, kolaborasi, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan fondasi untuk membentuk masyarakat yang demokratis dan responsif terhadap tantangan zaman (Wulandari et al., 2023).

Kesetaraan akses terhadap pendidikan dan peluang politik menjadi salah satu nilai utama dalam pendidikan demokrasi. Dengan menekankan pemberdayaan masyarakat, pendidikan demokrasi bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan individu dalam proses politik di berbagai tingkatan. Pemberdayaan ini tidak hanya meningkatkan partisipasi, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih memahami peran mereka dalam kehidupan demokrasi tingkatan (A et al., 2023).

Selain itu, pendidikan demokrasi menanamkan nilai-nilai toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan dialog antaragama. Nilai-nilai ini menjadi fondasi kehidupan demokratis yang inklusif dan harmonis. Dengan mengedepankan penghormatan terhadap kebhinekaan, pendidikan demokrasi membantu menciptakan masyarakat yang dapat hidup berdampingan dalam keberagaman tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip demokrasi (Firman et al., 2023).

Melalui pendekatan yang komprehensif, pendidikan demokrasi mencakup berbagai aspek penting untuk membentuk masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya. Dengan memanfaatkan jalur formal dan non-formal, peran media, pengembangan keterampilan, pemberdayaan, dan penanaman nilai-nilai toleransi, pendidikan demokrasi mampu menjadi instrumen penting dalam membangun masyarakat yang demokratis, inklusif, dan harmonis.

SIMPULAN

Pendidikan demokrasi memiliki peran penting dalam membangun masyarakat inklusif dan partisipatif di era globalisasi dengan memanfaatkan teknologi secara bijak dan mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan. Untuk mengatasi tantangan seperti ketidaksetaraan akses, literasi digital yang rendah, dan kurangnya integrasi nilai demokrasi, diperlukan strategi yang mencakup peningkatan akses pendidikan, penguatan literasi digital, dan kolaborasi antara lembaga pendidikan serta masyarakat sipil. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis nilai-nilai lokal seperti Pancasila, pendidikan demokrasi dapat menjadi

fondasi kuat bagi terciptanya masyarakat demokratis yang kritis dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- A, N., Norrahman, R. A., Muhammadong, & Wibowo, T. S. (2023). Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dalam Konteks Manajemen Pendidikan. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 1(2), 221–235.
- Afzalan, N., & Muller, B. (2018). Online Participatory Technologies: Opportunities and Challenges for Enriching Participatory Planning. *Journal of the American Planning Association*, 84(2), 162–177.
- Allifa, D., Saputry, I. K. D., Siahaan, M. A. B., Andreyan, D., & Hasibuan, H. A. (2024). Ancaman Disinformasi terhadap Stabilitas Demokrasi di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 8(3), 91–100.
- Allott, N., Knight, C., & Smith, N. (Eds.). (2019). *The Responsibility of Intellectuals: Reflections by Noam Chomsky and Others after 50 years*. UCL Press.
- Asril, Jaenam, Syahrizal, Armalena, & Yuherman. (2023). Peningkatan Nilai-Nilai Demokrasi dan Nasionalisme Pada Mahasiswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 1300–1309.
- Auxier, B., & Anderson, M. (2021). *Social Media Use in 2021: A majority of Americans say they use YouTube and Facebook, while use of Instagram, Snapchat and TikTok is especially common among adults under 30*.
- Burman, A., & Myrebøe, S. (Eds.). (2019). *Martha Nussbaum: Ancient Philosophy, Civic Education and Liberal Humanism*. Sodertorn University.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Damayanti, S., Suryadi, K., & Tanszhil, S. W. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Program Sekolah Ramah Anak: Kajian Literatur terhadap Hubungan dengan Pencegahan Perundungan. *Jurnal Widya Wacana*, 19(1), 1–8.



- Erlande, R., Komalasari, K., Taufika, R., Hardian, M., Fauzan, A., & Maharani, A. (2024). Membekali Warga Negara di Era Post-Truth: Peran Krusial Pendidikan Kewarganegaraan di Australia. *ASANKA: Journal of Social Science and Education*, 5(1), 61–78.
- Ernada, S. E. Z., Molasy, H. D., & Prabhawati, A. (2024). *Nasionalisme dan Etnopolitik dalam Hubungan Internasional: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Indonesia Emas Group.
- Firman, Putera, R. A., Nopenae, Indra, & Tarigan, B. E. P. B. (2023). Pengaruh Pendidikan Pesantren terhadap Karakter Pemuda Akademisi di Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 12976–12985.
- Hakim, M. L. (2023). *Kebijakan Sosial: Teori dan Praktik*. UB Press.
- Hazzan, M. K. (2022). Deception in the era of digital technologies and the distortion of reality and facts: An X-Ray of Nigerian peculiarities. *E-Learning and Digital Media*, 20(6).
- Herman, W. E., & Pinard, M. R. (2015). Critically Examining Inquiry-Based Learning: John Dewey in Theory, History, and Practice. In *Inquiry-Based Learning for Multidisciplinary Programs: A Conceptual and Practical Resource for Educators* (pp. 43–62). Emerald Group Publishing Limited.
- Jamil, Z. L. (2020). *Pengaruh Implementasi Pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Kinerja Guru terhadap Motivasi Belajar Siswa: Penelitian di Kelas XI MAN 1 Garut dan MAN 5 Garut*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Khusniya, E. N., & Syafi'i. (2024). Analisis Perkembangan Kosakata Bahasa Arab Modern: Peluang, Tantangan dan Strategi dalam Pembelajaran di Era Digital. *Lisan An Nathiq : Jurnal Bahasa Dan Pendidikan Bahasa Arab*, 6(2), 118–136.
- Kjosavik, D. J. (2021). Sen and Development as Freedom. In G. Crawford & A.-G. Abdulai (Eds.), *Research Handbook on Democracy and Development* (pp. 79–97). Edward Elgar Publishing Limited.
- Lathifah, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2024). Transformasi Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Stabilitas

- Pemerintahan Daerah Di Era Globalisasi. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 577–584.
- McCoy, J., Rahman, T., & Somer, M. (2018). Polarization and the Global Crisis of Democracy: Common Patterns, Dynamics, and Pernicious Consequences for Democratic Polities. *American Behavioral Scientist (ABS)*, 62(1).
- Nasir, M., Mahmudinata, A. A., Hafidulloh, Ulya, M., & Firdaus, F. A. (2023). Strategi Pemberdayaan Sekolah sebagai Upaya Peningkatan Manajemen Pendidikan. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 1(2), 799–816.
- Oral, E. (2024). The environmental rule of law and the protection of human rights defenders: law, society, technology, and markets. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, 24, 393–421.
- Rheingold, H. (2014). *Net Smart: How to Thrive Online*. The MIT Press.
- Schirch, L. (Ed.). (2021). *Social Media Impacts on Conflict and Democracy: The Tectonic Shift*. Routledge.
- Sukasni, A., & Efendy, H. (2017). The Problematic of Education System in Indonesia and Reform Agenda. *International Journal of Education*, 9(3), 183–199.
- Swastiwi, A. W. (2024). *Globalisasi dan Media: Konvergensi Budaya dan Komunikasi*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Tshishonga, N. S. (2023). Student Teaching for Critical Thinking and Emancipation at the University: A Freire's Liberatory Approach. In *Sustaining Higher Education Through Resource Allocation, Learning Design Models, and Academic Development* (pp. 148–174). IGI Global Scientific Publishing.
- Tufekci, Z. (2017). Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest. In *Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest*. Yale University Press.
- Wulandari, N. P., Vanesia, A., & Maulia, S. T. (2023). Pendidikan Demokrasi di Era Global. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1).